

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang terjadi, kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa semakin meningkat sekaligus bervariasi. Hal ini juga pada gilirannya menciptakan persaingan yang ketat diantara pelaku bisnis.

Didunia bisnis, baik ditingkat kecil atau besar, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, meskipun bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Tidak adanya modal dalam mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan, maka potensi untuk berkembangnya atau mungkin bertahannya unit usaha tersebut akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang menjadi sumber pemodalan yang menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Secara umum, fungsi utama dari lembaga keuangan adalah Intermediasi Financial dan Penyediaan Financial. Artinya lembaga keuangan bertujuan untuk menjembatani kebutuhan antara Unit ekonomi *surplus* (*surplus spending unit*) dan Unit ekonomi *defisit* (*deficit spending unit*). Dalam kegiatannya, lembaga keuangan meminjam uang (menggerakan

---

<sup>1</sup>Miranda Nasihin, 2012, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Buku Pintar, hal. 4

dana) dari unit ekonomi surplus, kemudian meminjam uang atau dana tersebut kepada unit ekonomi defiset.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Keuangan lainnya. Ketiga jenis lembaga keuangan tersebut mempunyai aturan-aturan khusus yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun disini penulis akan memilih dari ketiga jenis lembaga keuangan diantaranya yaitu mengenai Lembaga keuangan Lainnya. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan lainnya adalah lembaga-lembaga diluar lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang termasuk jenis lembaga keuangan ini adalah Lembaga Pembiayaan.

Dasar hukum Lembaga Pembiayaan adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan tersebut, Lembaga Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>3</sup>

Lembaga pembiayaan dianggap sebagai salah satu alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih fleksibel, lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena bidang usaha lembaga ini lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Lembaga pembiayaan muncul sebagai solusi agar dapat mengatasi masalah keterbatasan modal sehingga, pada gilirannya diharapkan mampu memberikan kontribusi

---

<sup>2</sup>Miranda Nasihin, *Loc. Cit*

<sup>3</sup>Periksa Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang *Lembaga Pembiayaan*

dalam bentuk penyaluran dana untuk menumbuhkan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 bahwa Perusahaan Pembiayaan Melakukan Kegiatan Usaha: Sewa guna usaha, Anjak piutang, Usaha kartu kredit dan Pembiayaan konsumen.<sup>5</sup>

Dari berbagai bidang usaha lembaga Pembiayaan tersebut yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya yaitu Pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen adalah suatu bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan dari bidang usaha pembiayaan konsumen itu dikhususkan menyediakan dana untuk kebutuhan konsumen guna membeli barang yang pembayarannya dilakukan secara berskala oleh konsumen.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemanfaatan jasa lembaga pembiayaan konsumen itu, lebih banyak dilatar belakangi oleh suatu keadaan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barang, tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang tersebut secara sekaligus atau secara tunai.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Miranda Nasihin, *Op. Cit*, hal. 7

<sup>5</sup>Lihat Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang *Lembaga Pembiayaan*

<sup>6</sup>Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, hal. 358

<sup>7</sup> R Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 52

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelum telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tandatangani secara yuridis para pihak terkait akan hak dan kewajiban masing-masing konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).<sup>8</sup>

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia. Jadi hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sejenis dengan perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lainnya.<sup>9</sup>

Lembaga Pembiayaan dalam pelaksanaannya diatur di dalam KepMenKeu Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pada perkembangan selanjutnya,

---

<sup>8</sup>Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar grafika, hal. 106

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 107

KepMenKeu Nomor 1251 berturut-turut dirubah dengan KepMenKeu Nomor 1256/KMK.00/1989, KepMenKeu Nomor 468/KMK.017/1995, dan KepMenKeu Nomor 446/KMK.017/1998. Pada KepMenKeu Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan, diatur bahwa modal ventura (*venture capital*) tidak termasuk dalam ke dalam Lembaga Pembiayaan. Oleh karena itu Perusahaan Pembiayaan diberikan dua opsi, yaitu sebagai Perusahaan Pembiayaan atau perusahaan modal ventura.<sup>10</sup>

Selanjutnya Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan diganti dengan KepMenKeu Nomor 448/KMK.017/2000, yang mengalami perubahan dalam KepMenKeu Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan. Terakhir, peraturan tentang Lembaga Pembiayaan digantikan oleh Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PKM.012/2006 tentang perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut PKM No. 84/PMK. 012/2006)<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia yang memberikan fasilitas pembiayaan adalah PT. Federal International finance (PT. FIF). PT. FIF adalah perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dimana kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen dan perdagangan kartu kredit.

---

<sup>10</sup>Miranda Nasihin, *Op. Cit*, hal.11

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 11

Pada saat ini kegiatan yang dilakukan PT. FIF adalah kegiatan usaha dalam hal pembiayaan konsumen. Penerimaan fasilitas adalah orang perorangan atau bisa badan hukum. Pada umumnya, obyek yang dibiayai dalam perjanjian pembiayaan ini adalah kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini penulis menganbil lokasi di wilayah kantor PT. FIF Cabang Kota kudas.

PT. FIF Cabang Kota Kudus dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa pinjaman dana untuk pembelian Pada kendaraan sepeda motor. Dalam proses pembiayaan tersebut pihak PT. FIF harus mempunyai keyakinan bahwa bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh hutangnya. Kontruksi pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi kedua belah pihak, maka pihak harus lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian sehingga tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak dikemudian hari serta harus memenuhi prinsip keadilan.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan perjanjian dikemudian hari. Didalam perjanjian pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijaminkan kepada pemberi fasilitas yaitu PT. Federal International finance (PT. FIF) sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (konsumen).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Betrik Ariesta, 2010, *Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Surakarta: UMS, hal 12-13

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Cabanag Kota Kudus)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan isi dari perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor pada PT. FIF?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor pada PT. FIF?
3. Permasalahan apa yang muncul didalam perjanjian pembiayaan di PT. FIF dan bagaimana cara mengatasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas maka peneliti menemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi dari perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor pada PT. FIF
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor pada PT Federal Internasional Finance.

3. Untuk mengetahui Permasalahan yang muncul didalam perjanjian pembiayaan di PT. FIF dan cara mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum perdata khususnya pada perjanjian pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan serta masalah timbul masalah timbul dan upaya penyelesaiannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan khusus dibidang hukum perjanjian dan umumnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Hasil penelitian ini hendaknya bisa berguna sebagai informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membeli kendaraan bermotor secara tunai.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan



pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat alamiah.

Metode yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dikatakan yuridis sosiologis karena mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial.<sup>13</sup> Penelitian ini meneliti tentang kesesuaian putusan perundang-perundang yang berlaku tersebut dalam kehidupan sosial dimasyarakat secara empiris. Orientasi pengkajiannya menitik beratkan pada aspek perlakuan norma-norma yakni perjanjian.

#### 2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, menggunakan bentuk penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih luas dan umum. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba menggambar dan menjelaskan yang selengkap-lengkapny tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor dengan PT.FIF Cabang Kota kudus. Menurut soerjono soekamto penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 71

<sup>14</sup>Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hal 5

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi di PT. Federal Internasional Finance (PT. FIF) Cabang Kota Kudus, hal ini dilakukan karena lokasi penelitian berkedudukan asli diKudus.

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer ini berupa data fakta atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data ini merupakan fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari studi perpustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah. Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai media massa yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>15</sup>

### 5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melaui dua metode, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliyah, Surakarta: FH UMS, Hal 47

a. Studi Lapangan

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara dengan personalia ataupun yang berwenang dengan perjanjian pembiayaan di FIF Cabang Kota Kudus.

b. Studi Perpustakaan (*library research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundangan-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan masalah diatas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, disusun dan ditulis dalam bentuk deskripsi dan dianalisis dengan menggunakan tehnik deskripsi kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena yang ada secara lebih kongkrit dan terperinci.

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang tersusun dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Unsur-Unsur Yang Terdapat Didalam Perjanjian
  - 3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian
  - 4. Jenis-Jenis Perjanjian
  - 5. Syarat Syahnya Perjanjian
  - 6. Prestasi dan Wenprestasi
  - 7. Berakhirnya Suatu Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan
  - 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan
  - 2. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan
  - 3. Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan
  - 4. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan
- C. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen
  - 1. Pengertian pembiayaan konsumen
  - 2. Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen

3. Pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen
4. Jaminan Pembiayaan konsumen

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. *Federal International finance* (FIF)

1. Sejarah perusahaan
2. Visi dan misi PT. *Federal International finance* (FIF)
3. Struktur Organisasi perusahaan

#### B. Hasil Pembahasan

1. Bentuk dan isi dari perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor pada PT. FIF cabang kota kodus
2. pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor pada PT. FIF Cabang Kota kodus.
3. Permasalahan yang muncul didalam perjanjian pembiayaan di PT. FIF dan cara mengatasinya

### BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN